

# KEWARGANEGARAAN

Volume 17 : Nomor 02, Nopember 2011

Pengembangan Profesionalisme Guru  
Melalui *Incentive Based Improvement*  
Ridho Harta

Pembelajaran Berbasis Masalah;  
Suatu Pendekatan Pembelajaran Antropologi  
Rosnah Siregar

Antropologi Dalam Pembangunan  
Murni Eva Marlina

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  
Dalam Perjanjian Internasional  
Reh Bungana PA

Implementasi Penegakan Hukum  
Dalam Menjamin Keadilan Masyarakat  
Parlaungan Gabriel Siahaan

Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya  
Sri Hadiningrum

Reformasi Kepartaian di Indonesia  
Ramsul Nababan

Peranan Jepang di Indonesia  
(Studi Kasus Bantuan Luar Negeri Jepang Terhadap  
Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh Pasca Tsunami)  
Prayetno

Diterbitkan oleh :

Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Sosial- Universitas Negeri Medan

ISSN 1693 – 7287

## **JURNAL KEWARGANEGARAAN**

### **Penerbit**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

### **Pembina**

Rektor Universitas Negeri Medan  
Dekan FIS Unimed

### **Penanggung Jawab**

Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

### **Dewan Penyunting Pakar**

Djanius Djamin, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)  
Abdul Muin Sibuea, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)  
Idrus Affandi, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)  
Ridwan A. Sani, Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)  
Warsono, Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

### **Ketua Penyunting**

Drs. Buha Simamora, SH., MH

### **Pelaksana Penyunting**

Drs. Suady Husein, SH., MS

Drs. Liber Siagian, M.Si

Dra. Yusna Melianti, MH

Drs. Halking, M.Si

Ramsul Nababan, SH

### **Sekretaris Penyunting**

Parlaungan Gabriel Siahaan, SH., M.Hum

### **Alamat Redaksi :**

Jurusan PP-Kn FIS UNIMED

Jl. Williém Iskandar Pasar V Medan K. Pos. 20221

Telp (061) 6625973 – Fak (061) 6614002

E-mail [PPKn@Plasa.com](mailto:PPKn@Plasa.com)

Jurnal Kewarganegaraan : terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Nopember. Penyunting mengundang para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk mengirim naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dari kategori Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Naskah yang dikirim agar mengikuti pedoman penulisan “Jurnal Kewarganegaraan”.

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi penyunting



## Jurnal Kewarganegaraan

Volume 17, Nomor 02, Nopember 2011




## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi .....iii



### Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

	Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui <i>Incentive Based Improvement</i> <b>Ridho Harta</b> .....	1
	Pembelajaran Berbasis Berbasis Masalah; Suatu Pendekatan Dalam Pembelajaran Antropologi <b>Rosnah Siregar</b> .....	22
	Antropolgi Dalam Pembangunan <b>Murni Eva Marlina</b> .....	36

### Analisis Hukum

	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Internasional <b>Reh Bungana PA</b> .....	47
	Implementasi Penegakan Hukum Dalam Menjamin Keadilan Masyarakat <b>Parlaungan Gabriel Siahaan</b> .....	67
	Tindak Pidana Korupsi dan Penangulungannya <b>Sri Hadiningrum</b> .....	81

### Wacana Demokrasi dan Politik

	Reformasi Kepartaian di Indonesia <b>Ramsul Nababan</b> .....	101
	Peranan Jepang di Indonesia (Studi Kasus Bantuan Luar Negeri Jepang Terhadap Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh Pasca Tsunami) <b>Prayetno</b> .....	129

## *Pengantar*

### **Redaksi**

*Jurnal Kewarganegaraan* setiap diterbitkan mengacu kepada tiga kategori, yaitu Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Dalam setiap terbit *Jurnal Kewarganegaraan* memuat tema sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dengan diterbitkannya *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 17 Nomor 02, Nopember 2011 menandakan bahwa "*Jurnal Kewarganegaraan*" Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed telah terbit sebanyak 17 kali, dan selalu rutin menerbitkan jurnal setiap tahun dua kali yaitu pada bulan Juni dan Nopember.

Pada terbitan kali ini menampilkan delapan tulisan dan karya ilmiah yang menitikberatkan pada persoalan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Hukum dan Demokrasi dan Politik.

Rubrik "Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran" yang membahas tentang **Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui *Incentive Based Improvement*** yang diangkat oleh **Ridho Harta** secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme guru sebagai salah faktor dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karenanya guru yang profesional pada dasarnya ditentukan baik kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian untuk menjawab profesionalisme guru menjadi tanggung jawab antara LPTK, Pemerintah, PGRI dan masyarakat. Namun peningkatan profesionalisme guru belum berjalan efektif, hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain faktor sosial, institusional, finansial serta faktor sosial ekonomi yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme guru.

Untuk rubrik "Analisis Hukum" dibahas oleh **Reh Bungana PA** yang mengangkat Issu berkaitan dengan **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Internasional**, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini tidak hanya menjadi urusan masing-masing negara, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. HKI yang diciptakan oleh seorang yang menjadi warga negara dari suatu negara dapat digunakan secara massal di seluruh dunia oleh masyarakat internasional. Oleh karena



itu perlindungan HKI sekarang ini sangat penting agar pemilik HKI tidak dirugikan. Perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional mengatur hampir semua aspek kehidupan internasional, termasuk HKI. Ada beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan HKI, diantaranya, Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan, Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, Konvensi Roma untuk Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Badan-Badan Penyiaran dan *TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*.

Sedangkan rubrik “Wacana Demokrasi dan Politik” yang di tulis oleh **Ramsul Nababan** mengangkat Issu yang berkaitan dengan **Reformasi Kepartaian di Indonesia**, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Setelah reformasi bergulir, negara ini dibanjiri dengan banyaknya muncul partai politik sebagai eforia dari demokrasi yang selama rezim orde baru negara ini terkungkung dalam jaman yang jauh dari tata cara demokrasi. Partai politik diibaratkan seperti iblis, disatu pihak dia sangat dibutuhkan sebagai elemen demokrasi, disatu pihak partai politik sering melanggar aturan-aturan demokrasi. Buruknya kinerja partai politik menjadi penyebab parpol bukan menjadi pilihan utama penyaluran aspirasi publik. Ketidakmampuan parpol melakukan kaderisasi kian memperlebar keraguan publik terhadap lembaga politik ini di dalam melahirkan pemimpin bangsa yang handal. Sebuah hasil penelitian yang sangat memperhatikan, dimana saat ketika parpol dibutuhkan pada saat transisi ini, maka partai politik pula yang disinyalir tidak mampu untuk melakukan fungsi-fungsinya yang dapat mengakomodasi kepentingan para konstituennya.

Penyunting senantiasa mengharapakan kepada para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk berpartisipasi mengirimkan naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan dengan kategori Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan pembaca pada umumnya, untuk menambah wawasan tentang kewarganegaraan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan tim penyunting yang telah bekerja keras, sehingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan.

Redaksi



## REFORMASI KEPARTAIAN DI INDONESIA

Oleh : Ramsul Nababan\*

### *Abstract*

*After the reformation rolling over, there are many parties appear in Indonesia as an euphoria of the democracy, as we know as long as the regime of government era since 11<sup>th</sup> March 1966 (orde baru) this country was confining in an era that far from democracy application. Political party can be considered as a devil, in one side it is really needed as a democracy element, but in another side the political party its self often violates the regulations of democracy. Kompas (Monday, April 16<sup>th</sup> 2007) reported a data that the badness of political party's work became the reason why the political party didn't become a main choice for channeling the public aspirations. The inability of the political party to build the cadres continuously broadens the doubt of public to this political committee in creating competent leaders. What a sorrowful outcome of research, where at the time when the political party is really needed in this transition time, but the political party is considered to be incompetent to carry out its functions that is to accommodate all its constituent's necessity.*

**Keywords :** Political Party, Party Reformation, Democracy

*Partai diibaratkan seperti orang sakit, partai tidak mau berobat, penyakitnya berkomplikasi, obat yang diberikan tidak manjur dan dokternya tidak mencoba melihat efek sampingnya<sup>1</sup>.  
(I Ketut Putera Erawan Ph.D)*

## PENDAHULUAN

Paper ini beranjak dari pemaparan apa yang diungkapkan oleh I ketut Putera Erawan yang menyangkut refomasi kepartaian. Mungkin tema ini sepertinya sudah lazim ditulis oleh beberapa pakar, akan tetapi

---

\* Ramsul Nababan, SH adalah Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

<sup>1</sup> I Ketut Putera Erawan. "*Mission Impossible* Reformasi Kepartaian Indonesia", dalam sebuah Paper yang diberikan pada mata kuliah Seminar Kepartaian dan Pemilu. S2 Ilmu Politik UGM angkatan 06

untuk melakukan reformasi partai politik bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan beberapa sudut pandang yang berbeda. Ini menjadi penting karena partai politik merupakan elemen yang penting didalam aturan negara demokrasi.

Setelah reformasi bergulir, maka negara ini dibanjiri dengan munculnya partai politik sebagai eforia dari demokrasi yang selama rezim orde baru negara ini terkungkung dalam jaman yang jauh dari tata cara demokrasi. Partai politik diibaratkan seperti iblis, disatu pihak dia sangat dibutuhkan sebagai elemen demokrasi, disatu fihak partai politik sering melanggar aturan-aturan demokrasi.

Partai politik yang ada di Indonesia pasca jatuhnya rezim Suharto bila mengikuti alur berfikirnya O'Donnell dan Schmitter bahwa terkategori kepada tahap fase Liberalisasi Politik awal.<sup>2</sup> Fase ini menurut beliau sebagai fase sebuah transisi dari otoritarianisme menuju sesuatu yang belum jelas. Sebuah transisi yang dimulai pecah rezim otoriter dan pengesahan kepada bentuk demokrasi, sedangkan liberalisasi adalah proses pendefinisian ulang perluasan hak-hak, dan liberalisasi merupakan proses mengefektifkan hak-hak yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan pihak negara atau puahk ketiga.<sup>3</sup>

Setelah pemilu tiga kali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009 yang ikuti oleh jumlah partai yang banyak maka kita akan dapat melihat kondisi parti politik yang ada sekarang ini sungguh jauh dari harapan. Kondisi partai yang ada sekarang ini cenderung menjadi broker,

---

<sup>2</sup> O'Donnell dan Schmitter yang berada dalam tulisan Lili Romli. "Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan", Jurnal Politika. Volume 2 NO 2 2006.

<sup>3</sup> *Ibid* hal. 22.



mengedepankan pragmatisme politik, dan mengabaikan fungsi-fungsi dari partai politik itu sendiri. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh litbang Kompas<sup>4</sup> bahwa buruknya kinerja partai politik menyebabkan parpol bukan menjadi pilihan utama penyaluran aspirasi publik dan ketidakmampuan parpol melakukan kaderisasi kian memperlebar keruguan publik terhadap lembaga politik ini didalam melahirkan pemimpin bangsa yang handal.

Sebuah hasil penelitian yang sangat memperhatikan, dimana saat parpol ketika parpol dibutuhkan pada saat transisi ini, maka partai politik pula yang disinyalir tidak mampu untuk melakukan fungsi-fungsinya yang dapat mengakomodasi kepentingan Partai-Partai Politik.

#### **RESEARCH QUESTION**

Ada apa dengan Partai Politik? Apa yang perlu diperbaiki dari partai politik? Dan bagaimana mengembalikan kepercayaan partai politik di masyarakat?

#### **PERJALANAN PARTAI POLITIK**

Di dalam sistem pemilihan Umum, Partai Politik masih menjadi pintu utama untuk mencapai kekuasaan. Kemunculan calon Independen seperti apa yang terjadi di Aceh bukan merupakan jalan terbaik sebagai jalan alternatif ditengah bobroknnya kinerja partai politik dalam pemilu, hal itu didasarkan pada calon Independen yang tercipta di Aceh merupakan hasil dari kesepakatan MoU Helsinki sebagai nota kesepahaman antara RI dan GAM. Calon independen sepertinya belum memiliki kekuatan yang cukup mumpuni untuk mencari alternatif dalam pemilu. Muncul sebuah kesan bahwa para pemegang kekuasaan dalam negara ini

---

<sup>4</sup> Toto Suryaningtyas "Keberadaan Parpol Mulai Terkikis" Kompas, Senin 16 April 2007.

tidak menginginkan terciptanya aturan-aturan main untuk mencari alternatif di tengah masyarakat yang sedang apatis terhadap keberadaan partai politik. Bisa saja hal ini merupakan akal-akalan dari para pemegang kekuasaan untuk tetap memelihara partai politik untuk tetap menjustifikasi terhadap basis dukungannya dan sengaja menutup pintu untuk terlaksananya calon Independen. Sebuah permasalahan yang cukup kompleks namun menarik untuk kita perhatikan.

Menurut Robert Huckson<sup>5</sup> Partai politik adalah sebuah sekelompok masyarakat yang otonom yang ingin menguasai pemerintah dan ingin menempatkan wakilnya di parlemen. Dilain pihak V.O Key Jr (1964) partai politik adalah sebuah partai yang mempunyai basis yang kuat dengan masyarakat dan mampu memback up kepentingan masyarakat.<sup>6</sup> Partai politik mewakili masyarakat atau, lebih tepatnya kepentingan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Partai politik mengumpulkan dan mengartikulasikan kepentingan tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam programnya. Sudah pasti program partai dipengaruhi oleh organisasi masyarakat sipil, seperti asosiasi bisnis, serikat buruh, organisasi agama, atau LSM.<sup>7</sup> Riswanda Imawan mengatakan bahwa partai Politik adalah sebuah unsur-unsur yang dibentuk secara sukarela, ada nilai-nilai atau cita-cita bersama, berorientasi pada pengendalian kekuasaan melalui jabatan publik dan

---

<sup>5</sup> Lihat Robert Huckson di dalam Jhon Kenneth White "What is Political Party" Richard S Katz and William Crotty. Hand Book of Party Politics. 2006. Sage Publications. hal. 1.

<sup>6</sup> *Ibid* hal .2.

<sup>7</sup> Partai Politik : "Hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Masyarakat Sipil", yang bersumber dari [www.forumpolitisi.org](http://www.forumpolitisi.org).

adanya legitimasi kekuasaan melalui pemilihan umum,<sup>8</sup> Sedangkan basis pembentukan paprol menurut Riswanda Imawan adalah kelompok sosial (buruh, Agama), Ideologi (Nasionalisme, Sosialisme), Kelas Sosial (Pengusaha), Sentimen Primordial (Kelompok Etnis). Riswanda juga menambahkan bahwa pada titik kenyataannya tidak ada partai yang hanya memiliki satu basis, sebab pada dasarnya partai adalah sebuah koalisi antara orang-orang dengan berbagai perbedaan kepentingan.

### **KRISIS IDEOLOGI.**

Sejak dikeluarkannya UU No 2 tahun 1999 tentang partai politik, keharusan untuk berasas tunggal Pancasila telah ditiadakan, dan tidak seperti pada tahun 1975 dimana UU No 3 Partai Golkar harus berasas tunggal yakni Pancasila. Menurut pasal 5 ayat 2 UU No 31/ 2002 telah terjadi perubahan 180 derajat dimana dikatakan bahwa partai politik dapat mencantumkan diri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

Secara singkat kita dapat menafsirkan bahwa parpol diberikan kebebasan untuk mencari format tersendiri sesuai dengan apa yang diperjuangkannya. Akan tetapi euforia yang sangat berlebihan dari partai politik justru membuat keadaan semakin runyam dan sangat membingungkan masyarakat. Pada pemilihan legislatif pada tahun 2004, menurut M Djadjiono maka partai yang ada diklasifikasikan menjadi 6 varian ideologi.

---

<sup>8</sup> Riswanda Imawan "Parpol dan Demokrasi" dalam sebuah materi kuliah Ilmu pemerintahan UGM.

<sup>9</sup> M Djadjiono. "Ideologi Partai Politik", Jurnal CSIS Vol 35. No 1. 2005.

IDEOLOGI PARTAI	KLASIFIKASI PARTAI
Pancasila Murni, tanpa adanya tambahan apa pun	PAN, PPKK, Partai Demokrat, PKPI, PPDI, PKPB, PKB, PDI-P PDS Partai Golkar, Partai Patriot Pancasila, PSI, Partai Pelopor, PPD
Pancasila dan UUD 1945	Partai Buruh Sosial Demokrat
Pancasila berasaskan kekeluargaan dan Gotong Royong	Partai Merdeka
Keadilan Demokarasi dan Pancasila	Partai Perhimpunan Indonesia Baru
Marhaenisme ajaran Bung Karno	PNI Marhaenisme, PNBK
Islam	PBB, PPP, PPNUI, PKS, PBR

Sumber diolah dari : M Djidjono, *Ideologi Partai Politik. Jurnal CSIS, 2005*

Realitanya saat ini menunjukkan bahwa, partai politik cenderung bertarung dengan partainya sendiri dengan berbagai alasan, atau munculnya konflik internal partai sehingga mengakibatkan perpecahan ditubuh itu sendiri. Beberapa alasan yang sering muncul dari perpecahan itu adalah, bahwa perjuangan partai sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dicita-citakan. Kasus perpecahan yang terjadi dapat kita lihat bagaimana dengan PDI-P dimana pertarungan antara Megawati dengan Eros Djarot, Kwik kian Gie, dkk, sementara di PKB dimana antara Gusdur dengan PBNU hasim Muzadi. Sebuah pandangan yang sangat ironis dimana ideologi sudah tidak memiliki arti, akan tetapi strategi-strategi pragmatisme untuk mejadi pucuk pimpinan masih menjadi primadona. Bagaimana mungkin adanya kesamaan ideologi, visi , misi partai menjadi terbelah kalau bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak elit. Para tokoh dan elite parpol pun tak mampu memberikan contoh panutan yang baik bagi kader dan masyarakat. Mereka lebih sibuk gontok-gontokan dan bagi-bagi kekuasaan ketimbang mengembangkan konsep pemikiran alternatif mengenai bagaimana membenahi persoalan-persoalan bangsa.



Sistem multi partai yang ada saat ini cenderung mengarah kepada oligarki partai politik yang akan menimbulkan persaingan antara elit di internal partai itu sendiri. Meminjam istilah yang digunakan Robert Michels maka sangat sering elit politik bertarung sesama elit di internal partai ingin menunjukkan bahwa “Partai adalah Saya”<sup>10</sup> sehingga perpecahan-perpecahan internal partai tidak dapat dihindarkan.

Hingga saat ini ideologi partai politik hampir tidak pernah dipakai dalam praktik politik di Indonesia. Akibatnya, parpol hanya mengikuti selera pemilih agar bisa mendapatkan dukungan suara. Padahal, tujuan berpartai bukan sekadar mendapat dukungan suara, tetapi juga untuk mendapatkan kekuasaan yang akan dipakai untuk mensejahterakan rakyat.<sup>11</sup>

Untuk melihat bagaimana ideologi itu telah berubah menjadi pragmatis saya akan mencobanya melihat partai PDI-P. Dalam hal ini penggunaan Ideologi terbagi kedalam dua bagian. *Pertama*, dalam tingkat bawah atau tingkatan masyarakat pedesaan, biasanya masyarakat pedesaan masih terikat pada sosok figur ataupun terikat dalam sebuah rangkaian historis. Dalam tingkatan bawah Ideologi digunakan sebagai topeng untuk menjaring massa agar dapat mendulang suara. *Kedua*, Ideologi yang digunakan di masyarakat perkotaan. Bagi masyarakat perkotaan ideologi hanya berorientasi kepada kalkulasi untung rugi, dan sifat pragmatisme, sehingga tidak memunculkan apa yang benar-benar diperjuangkan. Pada umumnya partai-partai yang ada di daerah bersifat *Follower* dan sangat ketergantungan dengan partai yang ada dipusat.

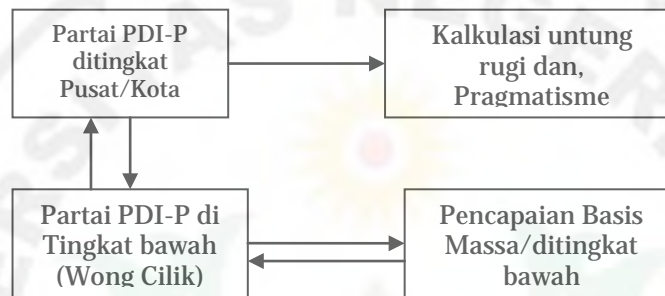
---

<sup>10</sup> Robert Michels “*Partai Politik Kecenderungan Oligarki dalam Birokrasi*”. terj hal. 252. CV Rajawali. Jakarta. 1984.

<sup>11</sup> *Parpol tidak Pakai Ideologi*, Kompas 14 Februari 2007.

Berikut ini saya sedikit mencoba melihat bagaimana prgeseran ideologi yang ada di partai politik sehingga menghilangkan identitas mereka.

### ***Krisis Ideologi di Parta PDI-P***



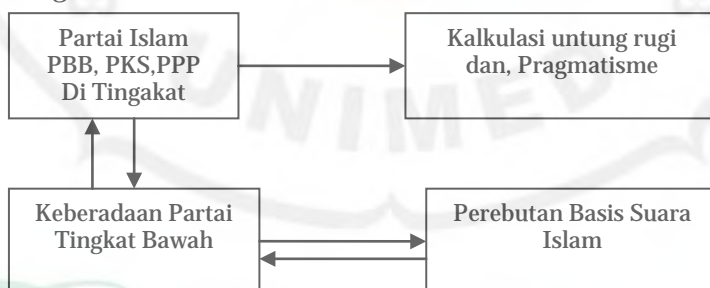
PDI-P yang dikenal dengan slogan *Wong Ciliknya* pada masa Megawati menjadi presiden cenderung melakukan kebijakan-kebijakan privatisasi BUMN yang dilakukan oleh staf menterinya seperti Laksamana Sukardi. Pada tingkatan bawah orang-orang kecil seperti penarik becak, para supir dan lain sebagainya, cenderung untuk dimobilisasi. Akan tetapi ketika suara sudah menjadi bulat dan menang dalam pemilu maka, perubahan itu akan menjadi kalkulasi politik, dengan ongkos demokrasi yang mahal.

Catatan yang menarik untuk dilihat adalah bagaimana dukungan Megawati terhadap Sutioso ketika hendak menjabat sebagai Gubernur DKI. Megawati sebagai pucuk pimpinan dengan lantang mengatakan bahwa dia akan mendukung Sutioso untuk menjadi Gubernur DKI.<sup>12</sup> Tetapi apa yang terjadi setelah Sutiyoso menjabat Gubernur, para tukang becak telah diberangus, dan para pedagang kaki lima telah digusur. Telah terjadi pembelokan ideologi, visi dan misi ke Wongcilikannya.

<sup>12</sup> Dhaniel Dakidae, *Partai-Partai Politik, Demokrasi dan Oligarkhi Dalam Sebuah Buku Partai-Partai Politik Indonesia, ideologi dan Program*. Kompas. 1 Februari 2004.

Pengakuan Djasri Marin dan mantan Panglima Kodam Jaya Slamet Kirbiantoro semakin menegaskan bagaimana ideologi politik bisa dibarter dengan uang. Djasri Marin menagih PDI-P dan PPP mengembalikan setorannya senilai Rp 3 miliar (Kompas, 16/6) dan juga pengakuan Sarwono Kusumaatmadja - mantan Sekjen Golkar rezim Soeharto-Orde Baru 1983-1988 - bahwa penolakan terhadap saya selalu terjadi pada saat-saat terakhir, saat "uang yang tak ada judulnya" itu mulai disebut.<sup>13</sup> Bila sesuai pengakuan Djasri Marin, asumsinya para cagub-wagub pilihan parpol membayar tiket masuk dengan nilai rupiah lebih besar. Secara moral dan hukum kedua pasangan itu tidak pantas berlaga sebagai cagub-wagub DKI Jakarta. Krisis itu tidak hanya terjadi di partai politik yang bernuansa Nasionalis akan tetapi dikalangan partai politik islam pun terjadi krisis ideologi sehingga menimbulkan partai yang miskin program.

***Krisis Program Partai-Partai Islam***



Selama ini, yang diusung parpol Islam di Indonesia baru simbol-simbol ideologi, bukan program nyata. Gambar Ka'bah yang diusung PPP atau bulan bintang Oleh PBB, Serta PKS dengan Bulan Sabit dengan Untaian padi yang tegak lurus. Sampai saat ini masyarakat sebenarnya tidak tahu apa perbedaan antara PKS, Partai Bulan Bintang, dan Partai

<sup>13</sup> M Fadjroel Rahman. "Partai politik For Sale", Kompas, Senin 18 Juni 2007.

Persatuan Pembangunan (PPP), yang notabene sama-sama partai berbasis Islam. Akibatnya parpol Islam di Indonesia tidak memiliki basis politik dan basis sosial yang kuat.<sup>14</sup> Sedikit menggelikan, ketika pada Pilpres ataupun Pilkada yang berlangsung mereka tidak memiliki kesepakatan yang sama, bahkan mereka cenderung berkoalisi dengan partai-partai yang jauh jarak ideologinya. Partai politik memang memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda, bukankah memiliki simbol-simbol islam yang dekat justru lebih memudahkan untuk memadukan program-program yang ada? Sebuah pandangan yang sangat ironis memang. tapi inilah kenyataan bahwa partai-partai masih bersifat pragmatis dengan memikirkan kalkulasi untung rugi.

Dilevel masyarakat mungkin banyak orang yang tidak begitu faham dan bahkan bingung ketika apa perbedaan antara partai-partai yang ber ideologikan islam. Kasus yang terjadi di Bangka Belitung merupakan gambaran yang perlu diperlihatkan. Partai PBB bagaimana mendukung seorang Ahok yang keturunan Etnis Tionghoa untuk menjadi Bupati. Sebuah pergeseran ideologi yang berimbas kepada taraf-taraf kebijakan yang akan diambil oleh elit yang memegang kekuasaan. Kasus PPP Jepara misalnya, meski ideologinya Islam ternyata hanya digunakan dalam upaya untuk merebut dukungan massa islam.<sup>15</sup>

Arbi Sanit mengatakan, bahwa distorsi ideologi partai akan secara langsung akan berdampak kepada program-program kebijakannya. Ada empat hal distorsi ideologi partai dalam pelaksanaan fungsinya.<sup>16</sup>

*Pertama*, Ketidakjelasan kaitan ideologi partai dengan system filosofi

<sup>14</sup> Khairina "Dicari Partai Wong Cilik" Kompas, 18 November 2006.

<sup>15</sup> Lili Romli etal "Potret Partai Politik Pasca Orde Baru", hal. 211. Pusat Penelitian Politik. LIPI 2003.

<sup>16</sup> Arbi Sanit "Pembaharuan Mendasar Partai Politik" 2003.



utama masyarakat dan negara. *Kedua*, tidak kukuhnya ideologi sebagai landasan program partai politik. *Ketiga*, lemahnya peran ideologi sebagai pedoman umum bagi menentukan strategi perjuangan partai. *Keempat*, kecenderungan kuat partai politik untuk menggunakan ideologi sebagai kamugflase kepentingan.

### **BACK TO BASIC**

Partai politik seperti apa yang dikatakan oleh Ramlan Surbakti sebagai Representation, atau mencerminkan suatu perskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan dan karena itu hendak diperjuangkan.<sup>17</sup> Ideologi partai masih menjadi penggerak utama dalam kegiatan partai politik dan ideologi partai politik merupakan pelita penunjuk arah bagi para pengurus partai politik yang berupaya untuk menampung dan mengagregasikan segala kepentingan simpatisan maupun rakyatnya, karena itu ideologi partai yang dianut oleh politisi akan berdampak secara langsung terhadap apa yang diperjuangkannya dalam pembuatan APBN/APBD, pada pernyataan politik yang dikemukakan untuk menanggapi persoalan yang dihadapi negara-bangsa, pada respon yang diberikan terhadap aspirasi yang diajukan berbagai kelompok, pola arah peraturan perundang-undangan yang diperjuangkan dan sosok kandidat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan-jabatan kenegaraan.<sup>18</sup>

Riswanda juga mengatakan bahwa mengembalikan ideologi ke partai politik itu penting, karena dengan demikian posisi partai akan

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti "*Perkembangan Partai Politik Indonesia*", yang di ambil dari bahan kuliah Seminar Politik Indonesia Kontemporer oleh I Ketut Putra Erawan. S2 Ilmu Politik UGM. 2007.

<sup>18</sup> *Ibid*

menjadi jelas dalam ranah penyusunan agenda dan perumusan kebijaksanaan publik.<sup>19</sup> Ideologi dalam partai politik juga akan menjaga standar normatif organisasional untuk menjaga eksistensi organisasi, dan dengan adanya ideologi akan dapat membantu partai politik menjaga diri dari penetrasi eksternal kedalam tubuh partai politik dan juga tak kalah pentingnya ideologi dapat membumikan aktor atau elit partai melalui adanya ikatan kesamaan norma diantara mereka dan publik.<sup>20</sup> Setelah pemaparan mengenai ideologi yang menjadi perhatian kita adalah seberapa penting kah ideologi dapat mempengaruhi para votersnya dan seberapa besar ideologi partai mempunyai peranan yang penting terhadap identitas partai politik.

Untuk memahami seberapa penting ideologi itu didalam partai politik, Riswanda Imawan membagi ke dalam dua tahapan.

1. Ideologi sebagai *Dikotomi*, selama ini para elit kebanyakan hanya memaknai ideologi hanya sebagai dikotomi yang menimbulkan perselisihan dengan partai lain atau menimbulkan perpecahan yang terjadi didalam tubuh partai tersebut. Kebanyakan partai yang kini mengalami konflik dan pecah seperti PDI-P Megawati dengan PDI-P eros Djarot, maupun yang terjadi di PPP dengan PBR merupakan perpecahan yang dilakukan beberapa elit politik partai yang sebenarnya mereka memiliki kesamaan ideologi.
2. Kedua adalah memahami Ideologi sebagai kajian *Spektrum* yakni, membicarakan ideologi dari segi perspektrum akan menjamin interaksi antar parpol berdasarkan issue based dan bukan power

<sup>19</sup> Riswanda Imawan. "*Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*", Sebuah pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. 2004.

<sup>20</sup> *Ibid*

bassed. Jika partai PDI-P dengan slogan partai wong ciliknya maka, partai tersebut tidak hanya berhenti sekedar dengan pengucapannya, akan tetapi bagaimana menerjemahkan isu yang berkembang dengan perspektif wong cilik.

Pemahaman-pemahaman dalam penerapan identitas partai politik yang ada di Indonesia masih terlihat sangat kabur. Jika kita membandingkan dengan parta-partai yang ada di Amerika Serikat, seperti Partai Republik dan Partai Demokrat yang mempunyai identitas yang jelas sehingga berdampak langsung terhadap berbagai kebijakan-kebijakan ketika mereka mendapat kekuasaan. Partai Republik lebih banyak mendapat dukungan dari kalangan pengusaha dan profesional dibanding partai Demokrat.<sup>21</sup> Partai Republik mempunyai basis dukungan dari tingkat SLTA sampai kepada tingkat Universitas dan para pemilih beragama kristen protestan pada umumnya juga mendukung partai republik. Pada tataran kebijakan politik luar negerinya mereka mendukung superioritas militer.<sup>22</sup> Di lain pihak partai Demokrat, basis pendukung nya berasal dari kalangan buruh dan rata-rata pendidikannya hanya dibawah SLTA, pemilih kulit hitam, dan kelompok agama katolik,<sup>23</sup> dan biasanya kebijakan-kebijakan yang diambil dari partai Demokrat sangat bertolak belakang dengan partai Republik. Partai Demokrat cenderung bersifat bagaimana mengatasi masalah-masalah dalam negeri, seperti pengangguran, ekonomi dan pembelaan kaum-kaum minoritas.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Bambang Cipto "Politik dan Pemerintahan Amerika", hal 59. Lingkaran. Yogyakarta. 2003.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid* hal. 61.

<sup>24</sup> *Ibid*

## OTONOMI KUSUS PARTAI POLITIK MENUJU PELEMBAGAAN PARPOL

Partai politik adalah salah satu organisasi yang tidak terkena dampak dari desentralisasi. Partai politik cenderung bersifat sentralistik yang kebijakan-kebijakannya masih ditentukan oleh elit-elit politik pusat yakni Jakarta sentris. Realitanya banyak perselisihan yang terjadi antara elit politik partai yang ada di pusat dengan yang ada di daerah. Ini membuktikan bagaimana partai politik alat demokrasi akan tetapi cenderung tidak demokratis.

Nilai-nilai demokratis sangatlah penting bagi perkembangan perkembangan ketangguhan partai. Demokrasi internal partai politik harus memiliki aturan dan prosedur yang bersifat impersonal dan tidak tergantung kepada seseorang untuk menghindari terjadinya kontrol sewenang-wenang dalam pemilihan internal, dalam penentuan calon-calon yang menduduki jabatan di level pusat, maupaun dilevel lokal.

Kebanyakan konflik-konflik yang muncul di dalam internal partai politik adalah tidak siapnya para elit politik untuk mengembangkan demokrasi secara internal, dengan demikian elit susah terkontrol sehingga akan menimbulkan resistensi dari para anggotanya. Konflik-konflik yang muncul rata-rata adalah masalah perebutan kedudukan atau kekuasaan didalam tubuh partai politik.<sup>25</sup> Maka dari itu, pertarungan-pertarungan diantara elit politik akan menyebabkan kerapuhan partai dan lemahnya konsolidasi diantara para kader.

Otonomi Partai politik merupakan hal yang perlu dilaksanakan jika partai ingin lebih mendapatkan aspirasi masyarakat. Selama ini

---

<sup>25</sup> Ign Kristanto dan Herman Meming. "Konflik Internal Partai", dalam buku Indonesia Dalam Krisis 1997-2002. Kompas. Hal 189.



hubungan antara DPP dengan DPD atau DPC merupakan hubungan subordinat. Maka dari itu otonomi di dalam partai politik hampir tidak pernah ada. Para pengurus DPP dan DPC harus merelakan mereka diintervensi oleh pihak DPP dalam hal pemilihan Gubernur/Walikota/Bupati. Elite politik di daerah hanya berfungsi sebagai mainan yang bergerak hanya atas, rekomendasi, dari perintah dari elite politik di pusat.

Sepertinya elit partai politik tidak siap untuk melakukan otonomisasi partai politik. Jika sentralisasi makin menguat ditubuh partai politik, maka angan-angan untuk mencapai kelembagaan partai politik akan sulit tercapai. UU Republik Indonesia No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, khususnya BAB VI Pasal 10, 11, 12, Masalah Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota harus ditinjau kembali oleh para elit politik sendiri. Di dalam pasal tersebut pemaknaan atas sentralistik terlalu kuat, tidak ada kata-kata yang memberikan ruang gerak bagaimana DPW ataupun DPC mempunyai hak untuk menentukan kebijakannya.

Untuk melakukan Otonomi Partai Politik setidaknya harus ada pengaturan bagaimana dalam UU Partai Politik, DPW dan DPC memiliki hak untuk melakukan kebijakan-kebijakan sendiri tentang daerahnya. Secara logis, hanya mereka yang mengerti kondisi apa sedang terjadi daerah tersebut dan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Setidaknya dalam UU partai politik pusat masih memiliki kewenangan tertentu, akan tetapi jika menyangkut permasalahan pemilihan kepala daerah, maka biarkanlah pihak DPW dan DPC yang menentukannya. Pemberian wewenang tersebut adalah memanusiaikan warga partai di daerah. Dengan pemberian wewenang tersebut, daerah tidak diperlakukan

sebagai alat pencapaian kekuasaan, melainkan sebagai sumber daya manusia dalam mencapai cita-cita bersama seluruh warga partai.<sup>26</sup> Sistem demokrasi yang tercipta diinternal partai setidaknya akan memperkokoh partai politik. Jika hal ini terpenuhi maka arah kelembagaan partai politik semakin mendekat.

Berbicara mengenai pelembagaan politik, maka partai politik harus mengalami pelembagaan atau istitusionalisasi yang berarti memiliki ketangguhan dan daya tahan, sanggup menghadapi berbagai krisis serta mampu menyuguhkan pemerintahan alternatif yang dapat dipercaya rakyat.<sup>27</sup> Setidaknya ada beberapa aspek untuk mengukur bagaimana partai politik itu mengalami pelembagaan.<sup>28</sup>

1. Ketangguhan Organisasi. Partai politik sangat berkepentingan meraih pemilih dan kekuasaan politik. Hal ini akan dapat dicapai secara memuaskan melalui penyebaran sumber daya partai secara efektif, pada tingkat lokal, regional dan nasional. Maka dari itu yang diperlukan partai politik adalah. Pertama, Partai politik harus merencanakan kegiatan tahunan partai. Kedua, Desentralisasi sumberdaya. Ketiga, Transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Keempat, Akuntabilitas. Kelima, tata-hubungan dan prosedur seleksi yang didasarkan pada prestasi dan solidaritas.
2. Demokrasi Internal Partai. Bagaimana partai politik memiliki aturan main tersendiri yang bersifat impersonal (tidak tergantung kepada seseorang) untuk menghindari terjadinya kontrol yang dilakukan secara sewenang-wenang. Keanggotaan partai didefenisikan sebagai

---

<sup>26</sup> Toto. *Op.Cit.*

<sup>27</sup> IMD, *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*, hal 12.

<sup>28</sup> *Ibid*

bagian yang penting demi terwujudnya pengawasan dan keseimbangan partai. Dalam suatu partai yang demokratis, para anggotalah yang harus memegang kendali.

3. Identitas Politik. Partai politik yang haus akan kekuasaan harus mengenalinya diri sendiri serta mengetahui apa yang diperjuangkannya agar dapat merangkul para pemilih. Untuk mendapatkan ketangguhan partai politik yang dapat dipercaya, maka partai politik harus serius memiliki identitas partai yang mempunyai ideologis, hal ini dibutuhkan agar dapat berdampak langsung terhadap kebijakan-kebijakan, jika suatu parpol tersebut mendapatkan kekuasaan.
4. Keutuhan Internal. Suatu partai politik dapat dikatakan tidak memiliki keutuhan internal jika partai tersebut mengalami pembelahan yang mengganggu sehingga dapat mengancam fungsi atau kinerjanya. Berbagai macam pendapat yang terdapat didalam tubuh partai politik harus dihargai dan mendapatkan tempat ditubuh partai.

Menurut Ramlan Surbakti pelebagaan partai politik ialah proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya (*the process by which the party becomes established in terms of both of integrated patterns of behavior and of attitude or culture*).<sup>29</sup> Ramlan Surbakti menambahkan bahwa pelebagaan partai politik mengandung dua aspek. Aspek Internal-Eksternal dan aspek struktural-kultural. Dan jika dipersilangkan maka ia

---

<sup>29</sup> Ramlan Surbakti "Tingkat Pelebagaan Partai Politik" Kompas. 6 Januari 2003.

akan menimbulkan empat karakter.<sup>30</sup> Adapun empat karakter yang dikatakan Ramlan Surbakti itu adalah sebagai berikut.

1. Derajat Kesisteman. Derajat kesisteman adalah bagaimana proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu
2. Derajat Identitas Nilai. Identitas nilai berkait dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik tetapi juga tampak pada basis sosial pendukungnya. Lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau platform partai itu.
3. Derajat Otonomi. Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa,

---

<sup>30</sup> *Ibid*



negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat).

4. Derajat Pengetahuan atau Citra Publik. Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Yang menjadi isu utama di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat.

### **MENUJU PARTAI MODERN**

Menuju Partai Politik yang modern yang mampu dijadikan sebagai corong aspirasi masyarakat merupakan tujuan yang telah banyak disampaikan oleh beberapa pakar politik. Secara singkat partai yang ideal adalah partai yang dianggap terbuka, partai politik dapat mewakili kepentingan kelompok masyarakat tertentu, partai perlu bersifat terbuka dan harus ada kemungkinan bagi anggota partai untuk mempengaruhi program dan gagasannya serta pilihan pimpinan dan seleksi kandidat untuk legislatif dan eksekutif dan Juga Partai politik harus mampu menyaring kebutuhan dan kepentingan konstituennya serta mentransformasikannya ke dalam satu program.<sup>31</sup> Komunikasi dan arus informasi perlu terbuka dan dua arah. Lebih lanjut partai yang mau menjadi partai yang pro rakyat harus menjamin akuntabilitas, tidak hanya

---

<sup>31</sup> “*Model Pengembangan Partai Politik Pro Rakyat*” yang dikutip dari [www.forumpolitisi.org](http://www.forumpolitisi.org).

eksternal tetapi juga internal terhadap anggotanya.<sup>32</sup> Partai politik akan menjadi sebuah institusi modern apa bila mampu membuka diri terhadap siapa saja dengan cacatan harus seimbang dan adanya transparansi ketika ia menjadi anggota partai<sup>33</sup>. Akan tetapi yang menjadi ganjalan kita adalah sejauh mana Partai-partai yang begitu banyak dapat melakukan fungsi-fungsi sebagai partai yang modern. Atau jangan-jangan masyarakat kita makin bingung dengan banyak-ragam partai politik dengan memiliki ragam tertentu sehingga semakin membuat masyarakat apriori terhadap partai politik.

Selama ini kebanyakan partai politik yang ada masih bersifat jauh dari kodratnya sebagai partai modern, mereka tidak mampu menjalankan fungsi-fungsinya dan hanya aktif ketika pada waktu pemilu saja. Setelah pemilu selesai maka kantor-kantor partai politik pintunya tertutup rapat-rapat. Setidaknya ada beberapa persyaratan parpol itu untuk menuju kearah partai yang modern. *Pertama*, partai politik dituntut harus memiliki mesin organisasi yang efektif dan efisien sehingga kegiatan-kegiatan Partai politik dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga kegiatan parpol dapat berjalan dengan baik.<sup>34</sup> Yang dimaksud dengan mesin organisasi partai politik adalah pendukung utama agar kegiatan-kegiatan parpol dapat berlangsung sesuai dengan rencana. *Kedua*, Kemandirian parpol dalam masalah pendanaan. Mandiri dalam artian bahaimana partai politik menjadi *self-sufficient* yang mampu memenuhi

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Graham Fox. “*Rethinking Political Parties*”, Parties as Modern Institutions. Hal 15 Discussion Paper. November 2005.

<sup>34</sup> Mawardi Rauf “ *Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan*” hal 15. Jurnal Politika. Volume 2. No 2.2006.

segala kebutuhan dan secara mandiri dan tidak tergantung kepada negara.<sup>35</sup>

UU No. 31 tahun 2002 memang melarang partai politik memiliki badan usaha, akan tetapi pada perkembangannya, sepertinya ada usulan bagaimana parpol yang berdiri harus memiliki tabungan yang tercatat direkening Bank. Masalah keuangan memang menjadi masalah yang rumit. Kalau parpol diberi bantuan oleh negara, maka parpol tersebut akan terus menerus menjadi ketergantungan kepada negara, sehingga akan menimbulkan partai politik juga merupakan alat negara seperti apa yang telah dilakukan Golkar pada masa Orde Baru. Akan tetapi jika diberikan peluang untuk mendirikan badan usaha, setidaknya akan memunculkan pola-pola KKN baru yang dikembangkan oleh Parpol.

Selama ini parpol masih tergantung kepada iuran anggota maupun sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada simpatisan. Inilah sebuah penyakit yang paling susah diobati. Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa orang mau menyumbang kepada partai politik? Dan apa maksudnya? Apalagi kalau bukan kalkulasi untung rugi yang ingin dicapai. Kesempatan ini setidaknya akan dimanfaatkan oleh reen-seeker sehingga menimbulkan seperti apa yang menjadi tesis Yosihara Kunio sebagai Kapitalis Erstzat<sup>36</sup>. Setelah masa reformasi bergulir maka, parpol bisa dikatakan sebagai pintu masuk bagi reen-seekers. Kasus yang sederhana adalah ketika pencalonan kepala daerah, berapa uang yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk menjadi Gubernur/walikota maupun Bupati yang diserahkan kepada Partai Politik.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Yoshihara Kunio. "*Kapitalisme Semu Asia Tenggara*", LP3ES. Jakarta. 1990.

Semakin banyak partai politik, semakin banyak polaritas ideologisnya dan semakin jauh jarak ideologisnya antara satu parpol dengan parpol lainnya, dan semakin membuat riuh gaduh dalam dinamika politiknya. Isu yang sedang berkembang adalah bagaimana partai-partai politik yang banyak dapat disederhanakan. Alasannya adalah bahwa kebanyakan partai sedang berlaku dianggap tidak mewakili apa yang menjadi kehendak masyarakat dan tidak mampu menciptakan parlemen dan pemerintahan yang efektif. Cara-cara yang digunakan sekarang ini untuk mengurangi banyaknya partai adalah dengan cara penggunaan *Electoral Threshold* (ET) yang memberi batas minimal perolehan suara lima persen untuk mengikuti pemilu berikutnya, dan dengan menerapkan sistem *Distrik Manaiture* (DM).<sup>37</sup>

Terlepas dari beberapa permasalahan diatas sebenarnya tuntutan mengenai pengurangan partai politik haruslah diperkirakan matang-matang. Dengan adanya penambahan *electoral threshold* menjadi 5 persen, dan dengan menggunakan Distrik maniture belum ada jaminan bahwa partai tersebut berkualitas bagus, atau dengan adanya peningkatan ET dan dengan DM, maka akan menimbulkan kesan proteksi bagi partai-partai lain untuk berkembang sementara kualitas dan akuntabilitas partai sangat terabaikan.

Yang paling dibutuhkan pada saat multi partai ini adalah bagaimana menciptakan ketertaturan-keteraturan politik, seperti apa yang diungkapkan oleh Saymor Lipset (1959) yang dikutip oleh ellyasa

---

<sup>37</sup> I Ketut Putra Erawan dalam Mata Kuliah “*Seminar Kepartaian dan Pemilu*”. S2 Ilmu Politik UGM angkatan 06.



Kh Darwis bahwa keteraturan politik merupakan salah satu syarat terbangunnya demokrasi.<sup>38</sup>

Berdasarkan typologi partai yang dikembangkan oleh Sartori, dengan typologi one-party, two-party, and multy party, maka dia menegaskan, bahwa partai yang jumlahnya kecil lebih relevan, baik dalam menciptakan sebuah koalisi dan menciptakan sebuah kompetisi diantara partai.<sup>39</sup> Maka dari itu bagi saya pribadi saya condong kepada penyederhanaan partai. Dengan menggunakan indikator ET yang dilakukan secara ketat. Ketat dalam artian adanya ketentuan untuk mencegah para elit politik untuk tidak membuat partai baru kalau partainya tidak lolos ET, sehingga harus menunggu pemilu berikutnya. Seperti apa yang digunakan Liga Sepakbola Indonesia dalam memberikan ketentuan masa waktu bermain kepada pemain asing. contoh pemilu tahun 1999 dan Pemilu tahun 2004 telah memberikan gambaran bagaimana keadaan partai politik, ternyata belum memberikan kemajuan baik dalam keteraturan politik, maupun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jika ET dilaksanakan dengan ketat, setidaknya akan menimbulkan 4-5 partai yang ikut bermain, sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Kacung Marijan<sup>40</sup> akan menimbulkan sistem partai yang moderat, dimana relasi antara ideologis antara partai tidak akan bercorak sentrifugal atau bertentangan dengan secara bermakna dengan parta lain.

<sup>38</sup> Ellyasa KH Darwis "Pembatasan Partai Politik" yang didownload dari <http://allyasa.blogspot.com>.

<sup>39</sup> Sartori's Typology: Moderate versus Polarized Pluralism didalam tulisannya. James Jhonson "Political Parties And Deliberative Democracy" hal. 56. Richard S Katz and William Crotty HandBook of Party Politics. Sage Publications. London 2006.

<sup>40</sup> Kacung Marijan "Partai Baru, Electoral Threshold dan Masa Depan Sistem Partai Politik". Hal 54 Jurnal Politika. Volume 2. No 2. 2006.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik memang tidaklah mudah, memerlukan sebuah proses tahapan bagaimana partai politik mampu melakukan fungsi-fungsinya dengan baik. Kita sudah Mahfum dengan keberadaan parpol kita, rata-rata partai yang ada di negeri kita adalah partai massa, dan sangat sedikit partai yang bisa dikatakan sebagai partai kader. Keinginan masyarakat tidak begitu muluk-muluk, yang dibutuhkan mereka adalah bagaimana aspirasi mereka dapat terealisasikan. Jadi partai politik yang seharusnya hendak dikembangkan adalah sebuah partai yang dapat dikontrol masyarakat, dan dibentuk dengan berdasarkan kepedulian yang sama pada suatu isu penting, dan para pengurus dan calon partai untuk lembaga legislatif dan eksekutif lebih terbuka, dan kompetitif dan meninggalkan praktek-praktek oligarkhis.<sup>41</sup>

Sebuah pekerjaan yang harus difikirkan bersama-sama. Terlebih kepada masyarakat sebagai kostituen dimana harus jeli untuk menentukan pilihannya. Bagi Partai Politik sebuah, tantangan bagaimana memperbaiki citra dimasa mendatang. Jika parpol tidak berubah, jangan salahkan masyarakat jika mereka melakukan Golput.

## **PENUTUP**

Salah satu pilar tegaknya demokrasi adalah berfungsinya partai politik sebagai penghubung antara pemerintahan dan warga negara. Hanya saja realita yang berkembang saat ini harmonisasi antara partai politik dan masyarakat cenderung kurang membaik. Hal ini dapat dilihat ketika partai politik tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari publik karena kinerja partai politik di Indonesia belum menunjukkan trend

---

<sup>41</sup> Ramlan *Op.Cit*

positif dalam pembangunan dan pembentukan demokrasi yang seutuhnya. Partai politik cenderung mengedepankan sikap pragmatisme politik. Carut marut partai politik semakin diperparah ketika para elit politik tidak mampu mengelola berbagai kepentingan politik sehingga dari hal tersebut sering menciptakan konflik antara elit politik, bahkan tak jarang pula terjadi konflik elit politik dalam internal sebuah partai politik.

Sampai saat ini partai politik masih menjadi pintu masuk dalam perhelatan demokrasi. Oleh sebab itu, partai politik harus menunjukkan eksistensi yang baik untuk pembangunan demokrasi itu sendiri. Setidaknya ada beberapa hal yang segera harus dibenahi jika partai politik ingin kembali mendapatkan simpatik dari masyarakat. *Pertama*, Partai Politik harus kembali kepada basis perjuangan ideologi partai. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir pragmatisme politik dan lebih mendekati pada konstituennya. *Kedua*, Partai politik harus cepat berbenah menuju sebuah pelembagaan partai politik yang bersifat otonom. Pelembagaan ini sangat diperlukan untuk menghilangkan oligarkhi partai itu sendiri. *Ketiga*, Partai politik harus menuju partai yang modern. Sepertinya hal ini harus menjadi prioritas utama menuju pelembagaan partai politik yang akuntabel. Partai politik harus mampu menciptakan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang jelas untuk menghindari elit politik yang memerankan politik bajing luncat. Selain itu, sistem keuangan partai politik juga mendapatkan prioritas utama, dimana hal ini sangat bersifat urgen untuk kelangsungan partai itu sendiri sekaligus untuk mengurangi hubungan antara pengusaha dan penguasa yang sering menimbulkan dampak negatif dalam proses bekerjanya sistem demokrasi itu sendiri.

Rencana penyederhanaan partai politik di Indonesia semakin baik ketika partai politik yang di Indonesia dapat merespon dengan cepat untuk memperbaiki tugas dan fungsi sebuah partai politik agar dapat memulihkan citra yang selama ini cenderung tidak baik di mata publik dimana pada akhirnya akan menciptakan sebuah keteraturan politik. Meminjam istilah yang digunakan oleh Lipset bahwa keteraturan politik merupakan salah satu syarat terbangunnya demokrasi.





## DAFTAR PUSTAKA

- Cipto Bambang *“Politik dan Pemerintahan Amerika”* 2003, Yogyakarta
- Djadijono, M *“Ideologi Partai Politik”* 2005, Jurnal CSIS Vol. 35. No 1.
- Erawan, Putera I Ketut. *“Mission Impossible Reformasi Kepartaian Indonesia”* dalam sebuah Paper yang diberikan pada mata kuliah Seminar Kepartaian dan Pemilu. S2 Ilmu Politik UGM angkatan 06 .
- Fox Graham *“Rethinking Political Parties”*. Parties as Modern Institutions. November 2005. Discussion Paper.
- Imawan, Riswanda *“Partai Politik di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri”* 2004. Sebuah pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_ *“Parpol dan Demokrasi”* dalam sebuah materi kuliah Ilmu pemerintahan UGM tidak terpublikasi.
- IMD, *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*.
- Kacung Marijan *“Partai Baru, Electoral Threshold dan Masa Depan Sistem Partai Politik”*. 2006 Jurnal Politika. Volume 2. No 2.
- Kristanto Ign dan Herman Meming *“Konflik Internal Partai”* Indonesia Dalam Krisis 1997-2002. 2002 Kompas.
- Kunio, Yoshihara *“Kapitalisme Semu Asia Tenggara”* 1990. Jakarta. LP3ES.
- Michels, Robert *“Partai Politik Kecenderungan Oligarki dalam Birokrasi”*. terj. 1984. Jakarta CV Rajawali.
- Robert Huckson di dalam Jhon Kenneth White *“What is Political Party”* Richard S Katz and William Crotty, Hand Book of Party Politics. 2006 Sage Publications.
- Romli, Lili *“Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan”* 2006. Volume 2 N0 2 Jurnal Politika.
- \_\_\_\_\_ etal *“Potret Partai Politik Pasca Orde Baru”* 2003 hal 211. Pusat Penelitian Politik. LIPI .

Rauf, Mawardi *“Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan”* Volume 2. No 2.2006. Jurnal Politika.

Sanit, Arbi *“Pembaharuan Mendasar Partai Politik”* 2003.

Sartori's Typology: Moderate versus Polarized Pluralism didalam tulisannya. James Jhonson *“Political Parties And Deliberative Democracy”*. Richard S Katz and William Crotty. HandBook of Party Politics. 2006. London. Sage Publications.

Surbakti, Ramlan *“Perkembangan Partai Politik Indonesia”* yang di ambil dari bahan kuliah Seminar Politik Indonesia Kontemporer oleh I Ketut Putra Erawan. S2 Ilmu Politik UGM. 2007.

#### **SURAT KABAR**

Dakidae, Dhaniel, *“Partai-Partai Politik, Demokrasi dan Oligarkhi”* dalam sebuah buku Partai-Partai Politik Indonesia, ideologi dan Program.1 Februari 2004. Kompas.

Ramlan Surbakti *“Tingkat Pelembagaan Partai Politik”* Kompas. 6 Januari 2003.

Sugiarto ,Toto *“Desentralisasi Partai Politik”*, Kompas. 3 Agustus 2003.

Intervensi Partai Politik Pusat ke Daerah, Kemenangan Bagi NKRI. Kompas 3 Agustus 2003.

Khairina *“Dicari Partai Wong Cilik”* Kompas, 18 November 2006

*Parpol tidak Pakai Ideologi*, Kompas 14 Februari 2007.

Suryaningtyas, Toto *“Keberadaan Parpol Mulai Terkikis”* Kompas, Senin 16 April 2007.

Rahman, M Fadjoel *“Partai politik For Sale”*, Kompas, Senin 18 Juni 2007.

#### **SITUS INTERNET**

Partai Politik : *Hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Masyarakat Sipil* yang bersumber dari [www.forumpolitisi.org](http://www.forumpolitisi.org).

Model *Pengembangan Partai Politik Pro Rakyat* yang dikutip dari [www.forumpolitisi.org](http://www.forumpolitisi.org).

Ellyasa KH Darwis *“Pembatasan Partai Politik”* yang didownload dari <http://allyasa.blogspot.com>